



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sri Maryati^{1*)}, Ibnu Muttaqin²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal
E-mail : viamaryati44@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds on Regency/City Regional Expenditures in Central Java Province in 2016-2020. The research method used is quantitative, using secondary data types, then data is collected and processed using the SPSS 22 application. The population and samples used in this study are Regency/City budget realization reports for a 5-year period (2016-2020). This study uses descriptive statistical data analysis, while the unit of analysis used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it was found that Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds had a positive effect on Regional Expenditures in Central Java Province in 2016-2020.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Regional Expenditure.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif, menggunakan jenis data sekunder kemudian data dikumpulkan dan diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini meruokan laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota selama pridode 5 tahun (2016-2020). Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif, sedangkan unit analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahun pemerintahan daerah dalam hal keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan adanya APBD agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan jumlah pendapatan yang telah diterima bersama dengan pengelua-

ran yang hendak dibelanjakan (Ibrahim I, 2014: 99)

Pelaksanaan dari otonomi daerah diwujudkan melalui pemanfaatan dan administrasi pada bidang anggaran keuangan, yang dijabarkan dalam APBD (Jayanti, 2020: 336). Dengan begitu kemampuan pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakat melalui pembangunan dapat terlihat jelas.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kewenangan akan menyalurkan dana kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, sehingga pemerintah daerah bisa pula meningkatkan kemandirian daerah, dan potensi-potensi daerah bisa dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2015).

Struktur pendapatan dan rancangan APBD Kabupaten Tegal mengalami penurunan tahun 2020, namun pembiayaan mengalami peningkatan. Penurunan pendapatan karena adanya penurunan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Untuk pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 2.875.037.755.000 turun sekitar 8,46% atau sebesar Rp 243.182.951.000 sehingga menjadi sebesar Rp 2.631.854.804.000. Alasan penurunan itu karena PAD turun 9,30% atau sebesar Rp 41.903.934.000, dan dana perimbangan juga turun 10,69% atau sebesar Rp 179.693.195.000. Pendapatan daerah lain-lain yang sah turun 3,19% atau sebesar Rp. 24.585.000. Kemudian Bupati Tegal menjelaskan kondisi pengeluaran yang turun 6,46% atau sebesar Rp. 186.867.568.000, sebelumnya Rp. 2.891.805.253.000. menjadi sebesar Rp. 2.704.937.685.000.

Penurunan belanja, terutama belanja tidak langsung, disebabkan oleh penurunan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan desa. Kemudian, pengurangan belanja langsung disebabkan oleh berkurangnya aktivitas yang memerlukan *refocusing* dan relokasi anggaran dan penyesuaian anggaran untuk mencegah dan menangani Covid-19. Belanja tidak langsung turun 0,20% atau sebesar Rp. 3.364.435.000, dan belanja langsung turun 15,15% atau sebesar Rp. 183.503.133.000.

Selain mengalami penurunan pendapatan, Bupati Tegal juga menjelaskan pembiayaan mengalami peningkatan yaitu dana yang diterima merupakan realisasi penyesuaian SILPA, berdasarkan hasil audit BPK RI dan belanja pembiayaan juga mengalami peningkatan untuk menambah penyertaan modal dari AMO Bank Jateng. Peningkatan pendapatan pembiayaan mencapai 189,04% dari Rp 58.164.383.000 yang sebelumnya Rp 30.767.133.000 sehingga menjadi Rp 88.931.881.000, dan beban pembiayaan sebelumnya sebesar Rp 14.000.000.000, mengalami peningkatan 13,21% atau sebesar Rp 1.849.000.000 menjadi Rp. 15.849.000.000 Umi Azizah, n.d (2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian terdahulu ini yaitu penelitian oleh Andrean & Sari tahun 2020, Wati & Fajar tahun 2017 dan Fatmawati & Sari tahun 2021, yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi adalah dasar yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pemilik dan pengelola, sehingga *corporate governance* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan arsi-metri pemilik dengan pengelola (Amaliah, Tri Handayani, 2013: 18). Ada tiga asumsi dasar dalam teori agensi mengenai manusia, yaitu manusia umumnya mementingkan dirinya sendiri, daya pemikiran yang sangat terbatas dimiliki oleh manusia dan manusia cenderung menghindari segala bentuk resiko yang mungkin terjadi. (Ujiyantho, Arief dan Agus P, 2007: 5).

Teori Penganggaran Sektor Publik

Abdul Halim (2008: 62) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter yang dipresentasikan.

Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban dari daerah untuk melakukan pengurangan keuangan atau kekayaan bersih daerah, selama satu tahun untuk keperluan pembangunan daerah. Belanja daerah terbagi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsi, yang dimaksud berdasarkan sifat yaitu

ekonomi dimana belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya, terdiri atas pembangunan perumahan dan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial (Rustariyuni, S. D. 2014: 50).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Halim (2008:96) adalah dana yang diterima untuk daerah yang bersumber dari ekonomi daerah.

Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19 menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh APBN, kemudian digunakan untuk pembangunan daerah guna memenuhi kebutuhannya.

Dana Alokasi Umum

Kuncoro (2014: 63) menjelaskan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah *block grant* yang diberikan ke semua kabupaten dan kota, bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fisik suatu daerah. Banyak dan tidaknya DAU setiap daerah dipengaruhi oleh faktor celah fisik (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Mardiasmo (2004:144) merupakan dana yang dikeluarkan untuk membiayai keperluan khusus atau tertentu, misalnya program nasional atau program kegiatan tertentu.

Dana Bagi Hasil

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan oleh APBN, kemudian digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan daerah yang telah dipresentasikan oleh daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena terdapat angka-angka yang merupakan variabel, diolah dengan bantuan SPSS untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Populasi yang digunakan yaitu Laporan Anggaran APBD periode 2016-2020

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Dalam menentukan sampel dengan cara teknik sampling jenuh. Maka sampel dalam seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD periode 2016-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian dokumentasi dengan data sekunder, yaitu Laporan APBD Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal maka digunakan uji normalitas.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			175
Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,08570045
Most Extreme Differences	Absolute		,063
	Positive		,061
	Negative		-,063
Test Statistic			,063
Asymp. Sig. (2-tailed)			,091 ^c

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 1 maka dapat dikatakan variabel berdistribusi normal dengan nilai signifikansi yaitu $0,091 > 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolineritas yaitu apabila nilai tolerance > 0.10 dan $VIF < 10$, maka tidak terdapat gejala multikolineritas, dan apabila nilai tolerance < 0.10 dan $VIF > 10$ maka terjadi gejala multikolineritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

Model	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah	0,768	1,302
Dana Alokasi Umum	0,497	2,012
Dana Alokasi Khusus	0,575	1,738
Dana Bagi Hasil	0,849	1,177

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Hal ini berarti, tidak terjadi multikolonieritas.

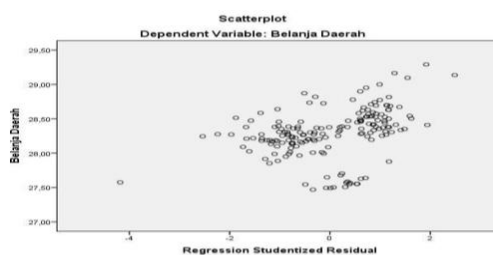
Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,928 ^a	0,861	0,858	1,831

Berdasarkan tabel 3 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada gejala autokorelasi, dengan nilai *Durbin-Watson* (DW) =1,831.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1 . Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas, karena titik-titik menyebar secara tidak beraturan sumbu 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola tertentu.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4 . Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	-2,896		-2,935	,004
	Pendapatan Asli Daerah	,211	,265	8,142	,000
	Dana Alokasi Umum	,834	,707	17,463	,000
	Dana Alokasi Khusus	,056	,091	2,424	,016
	Dana Bagi Hasil	,046	,072	2,310	,022

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 4 analisis regresi maka diperoleh persamaan linear *untandarized coefficients beta* untuk mengetahui Pengaruh antara PAD, DAU, DAK serta DBH terhadap Belanja Daerah BD. Sebagai berikut:

$$Y = -2,896 + 0,211. PAD + 0,834. DAU + 0,056. DAK + 0,046. DBH + e$$

- Nilai α sebesar -2,896, artinya jika variabel independen bernilai konstan, maka nilai Belanja Daerah adalah sebesar Rp. -2,896.
- Koefisien PAD = 0,211 bernilai positif, artinya apabila mengalami 1 kenaikan maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,211%.
- Koefisien DAU = 0,834 bernilai positif. artinya apabila DAU mengalami 1 kenaikan maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,834%.
- Koefisien DAK = 0,056 bernilai positif, artinya apabila DAK mengalami 1 kenaikan maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,056 %.
- Koefisien DBH = 0,046 bernilai positif, artinya mengalami 1 kenaikan maka Belanja Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,046 %.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5. Hasil Statistik Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,240	4	4,560	264,344	,000 ^b
	Residual	2,933	170	,017		
	Total	21,173	174			

Sumber: Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat dikatakan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan

berpengaruh positif terhadap BD, dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} (264,344) > f_{tabel} (2,42)$

Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Statisti Uji t

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	-2,896		-2,935	,004
	Pendapatan Asli Daerah	,211	,265	8,142	,000
	Dana Alokasi Umum	,834	,707	17,463	,000
	Dana Alokasi Khusus	,056	,091	2,424	,016
	Dana Bagi Hasil	,046	,072	2,310	,022

a. Dependent Variable : Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS 22 (2021)

Berdasarkan uji t pada tabel 6 diperoleh hasil sebagai berikut:

- PAD berpengaruh positif terhadap BD dengan nilai $t_{hitung} (8,142) > t_{tabel} (1,65361)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak
- DAU berpengaruh positif terhadap BD dengan nilai $t_{hitung} (17,463) > t_{tabel} (1,65361)$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya H_2 diterima dan H_0 ditolak.
- DAK berpengaruh positif terhadap BD dengan nilai $t_{hitung} (2,424) > t_{tabel} (1,65361)$ dan nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Artinya H_3 diterima dan H_0 ditolak.
- DBH berpengaruh positif terhadap DB dengan nilai $t_{hitung} (2,310) > t_{tabel} (1,65361)$ dan nilai signifikan $0,022 < 0,05$. Artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak.

Uji R^2

Tabel 7. Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,928 ^a	0,861	0,858

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7 dapat dikatakan bahwa diperoleh *Adjut R Square* 0,858 atau 85,8% Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dan 14,2 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah. Dengan nilai $F_{hitung} (264,344) > F_{tabel} 2,42$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai $t_{hitung} 8,142 > t_{tabel} 1,65361$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
3. Dana Alokasi Umum memiliki nilai $t_{hitung} 7,463 > t_{tabel} 1,65361$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_3 diterima artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja daerah.
4. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai $t_{hitung} 2,424 > t_{tabel} 1,65361$ dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ maka H_4 diterima artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
5. Dana Bagi Hasil memiliki nilai $t_{hitung} 2,310 > t_{tabel} 1,65361$ dan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ maka H_5 diterima artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah menggali lagi lebih banyak potensi asli daerah, baik secara lebih intensif maupun secara ekstensif.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat lebih memanfaatkan dana pendapatan asli daerah secara lebih efisien dan efektif untuk membangun infrastruktur publik.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas wilayah yaitu priode tahun laporan APBN diperpanjang lagi dan sasaran penelitian tidak hanya kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah saja, selain itu juga menambah variabel dalam penelitian seperti dana transfer pemerintah dan dana pemerintah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>
- Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi? *PERMANA*, 13(1), 46–59.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159>
- Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). ANALYSIS OF ABNORMAL RETURN, STOCK RETURN AND STOCK LIQUIDITY BEFORE AND AFTER BUYBACK SHARE: CASE STUDY OF COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN PERIOD OF 2011-2015. *Rjoas*, 11(November), 312-323. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, I. (2014). Perencanaan Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15 (01). 98-111. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/215>.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335-341. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30045>.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nomor, U. U. R. I. (33). Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta*.
- Nur, A. M. A., & Dadan, R. (2017). Analysis of abnormal return, stock return and stock liquidity before and after buyback share: case study of companies listed in Indonesia stock exchange in period of 2011-2015. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 71(11).
- Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*, 10(1), 45-55. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=WlItrKsgAAAAJ&citation_for_view=WlItrKsgAAAAJ:8k81kl-MbHgC
- Tambunan, T. T. (2015). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. A. (2007). Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(6), 1-26. <http://repository.binus.ac.id/2009-2/content/F0812/F081266166.pdf>
- Umi Azizah. (2020). Dalam Struktur Perubahan APBD Tahun 2020, Pendapatan dan Belanja Turun namun Sektor Pembiayaan Naik. <https://dprd-tegalkab.go.id/2020/08/25/dalam-struktur-perubahan-apbd-tahun-2020-pendapatan-dan-belanja-turun-namun-sektor-pembiayaan-naik>